

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada setiap pekerjaan proyek seperti pembangunan gedung, bendungan, jembatan, jalan dan lainnya memiliki perencanaan untuk mengetahui anggaran dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan proyek. Selain itu, pengawasan pada pelaksanaan dan penjadwalan juga dibutuhkan agar proyek berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Banyak proyek yang mengalami keterlambatan karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pada proyek.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 52 Tahun 2015, Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dikutip dari MetroTimes Yogyakarta (2020) pekerjaan Proyek Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat DIY TA 2019 yang di menangkan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Nusa Patria, nilai Penawaran sebesar Rp. 14.189.598.826,01 alamat kantor Tegalan, Sidomoyo, Godean, Sleman DIY Yogyakarta dengan waktu Pelaksanaan 14 Mei 2019 hingga 19 Desember 2019 yang hingga saat ini Pekerjaan masih berlangsung di tahun 2020.

Keterlambatan proyek di Pembangunan Gedung Inspektorat DIY bukan hanya berdampak pada reputasi kontraktor, tetapi juga berdampak pada reputasi Inspektorat DIY selaku pemilik proyek yang dilihat sebagaimana fungsinya, bisa dijadikan contoh bagi institusi pemerintahan yang ada di Yogyakarta. Kasus keterlambatan proyek tidak hanya terjadi di proyek pembangun Gedung Inspektorat DIY. Banyak proyek, baik dari lingkup pemerintahan ataupun swasta yang mengalami keterlambatan.

Pada berita yang dibawakan oleh JurnalNews.id (2019) Sebanyak empat paket proyek pembangun gedung di Rumah Sakit (RS) Mokopido, Tolitoli Provinsi Sulteng terancam tidak bisa selesai tepat waktu, sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Meski masa kontrak empat pekerjaan dengan nilai

hampir mencapai Rp20 miliar itu baru akan berakhir pada Desember 2019, namun sampai Agustus 2019 progres pekerjaan masih di kisaran 15-20 persen.

Pada berita yang dibawakan oleh Tribun Jateng (2019) Pembangunan RSUD Mijen kelas D mengalami keterlambatan pengerjaan. Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah menuturkan, hingga saat ini pembangunan RSUD Mijen baru terealisasi 45 persen. Dalam waktu yang tersisa ini seharusnya pembangunan sudah menginjak sekitar 70-75 persen. Pengerjaan RSUD Mijen telah dimulai sejak 18 Juli 2019.

"Kontraktornya bermasalah, di pertengahan jalan mereka kehabisan dana" tutur Irwansyah, Selasa (26/11/2019). Dikatakan, surat peringatan satu dan dua telah dilayangkan oleh Distaru kepada pihak kontraktor PT Daya Bangun Mandiri. Diharapkan, kontraktor dapat mengejar keterlambatan dengan waktu yang tersisa.

Adapun waktu pelaksanaan pembangunan selama 150 hari. Sehingga, kontraktor harus merampungkan pembangunan RSUD Mijen kelas D maksimal 14 Desember 2019. Jika tidak dapat merampungkan proyek senilai Rp 10 miliar itu, Irwansyah menegaskan, akan memutus kontrak.

Dampak yang sering dialami oleh kontraktor jika terjadi keterlambatan proyek konstruksi yaitu biaya yang bertambah lebih besar dibandingkan dengan biaya estimasi diawal, tambahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang mana harus dilakukan penjadwalan ulang, terlambatnya pembayaran, berkurangnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja, dan tentu saja yang paling dampak yang paling utama adalah reputasi perusahaan atau kontraktor yang dipertaruhkan. Kontraktor juga bisa mendapatkan sanksi berdasarkan kontrak yang telah disepakati seperti denda hingga pemutusan kontrak.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin mengetahui suatu kajian untuk menganalisa dan mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor keterlambatan pada Proyek Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti untuk tugas akhir ini antara lain :

1. Apa saja faktor risiko keterlambatan Proyek Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Pekerjaan apa saja yang berpotensi mengalami keterlambatan pada Proyek Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **1.3 Lingkup Penelitian**

1. Pada penelitian ini data yang digunakan dari Proyek Pembangunan Fisik Gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pada penelitian ini faktor–faktor yang diteliti berkaitan langsung dengan risiko keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
3. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pekerjaan pondasi dan struktur.
4. Penelitian dilakukan di Yogyakarta

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan melaksanakan penelitian ini adalah :

Melakukan analisis nilai risiko keterlambatan pekerjaan pada proyek pembangunan fisik gedung Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor risiko keterlambatan dan dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan yang ada didalam proyek dari risiko yang tertinggi hingga yang terendah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan saran apabila akan terulang lagi kejadian keterlambatan pekerjaan seperti ini dan dapat meminimalisir kejadian.
2. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam studi keterlambatan pembangunan untuk Mahasiswa/I Program Studi Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.